

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Perencanaan Pembelajaran

Kurikulum, silabus dan RPP merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan satu sama lain. Perangkat perencanaan pembelajaran yang dimiliki oleh SMP Negeri 19 Jakarta telah disusun sesuai dengan tuntutan kebijakan yang ada. Baik dari segi sistematika, maupun dari keterlibatan pihak-pihak di dalamnya. Perangkat perencanaan tersebut tidak hanya menekankan pada *academic orientation*, yang berdasarkan pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, akan tetapi di dalam prosesnya juga sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pribadi siswa, dan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan siswa mengkonstruksi sendiri pemahamannya terhadap sesuatu hal atau materi. kebutuhan individu, dan minat siswa maupun guru harus difasilitasi dengan baik ketika guru sedang menyusun perencanaan pembelajaran. Hal ini sudah dilakukan oleh SMP Negeri 19 dengan mengemas pembelajaran ke dalam model pembelajaran yang bervariasi, ada teori, praktek, ada pola belajar secara individu dan berkelompok, semua itu dapat memfasilitasi karakteristik dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda.

Perencanaan memang memegang peranan penting dalam pembelajaran, dimana di dalamnya terdapat tahap-tahap penting untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, yaitu pengorganisasian pembelajaran, penetapan tujuan pembelajaran dan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran tiap tatap muka.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Persyaratan pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 19 Jakarta sudah terpenuhi, baik dalam hal penetapan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar, penetapan beban kerja minimal guru, pengadaan buku teks siswa, pemilihan bahan ajar hingga pengelolaan kelas.

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung juga sudah mengindikasikan pada perencanaan yang telah disusun di awal tahun ajaran. Nuansa pembelajaran yang menganut paham konstruktivisme begitu jelas teramati, dengan aktivitas pembelajaran yang didominasi oleh aktivitas siswa. Interaksi guru-siswa tidak lagi bersifat formal, sehingga siswa lebih mudah/santai untuk berkomunikasi dengan guru di dalam kelas. Guru SMP Negeri 19 Jakarta telah memiliki karakteristik fasilitator yang baik dalam pembelajaran yaitu guru memiliki kepercayaan pada tujuan konstruktivisme. Guru juga tampak memiliki keinginan yang kuat agar siswa mampu menarik kesimpulan sendiri dan membangun opininya sendiri, menaruh penghargaan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip konstruktivis termasuk belajar aktif, kongkrit, kegiatan

berkelompok dan refleksi, berkeinginan membantu siswa untuk memahami dengan menyediakan tahapan-tahapan pemahaman yang diperlukan.

3. Penilaian Pembelajaran

Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran di SMP Negeri 19 Jakarta tidak hanya ditujukan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif semata, tetapi telah mencakup seluruh aspek kepribadian siswa, seperti: perkembangan moral, perkembangan emosional, perkembangan sosial dan aspek-aspek kepribadian individu lainnya. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap bentuk-bentuk alat penilaian yang digunakan oleh guru. Variasi alat penilaian muncul, tidak lagi pada ranah kognitif, tapi juga pada ranah lainnya, seperti yang telah dibuktikan dalam dokumen-dokumen penilaian yang ada. Dengan demikian, meskipun ketercapaian standar kompetensi lulusan menjadi salah satu acuan dalam menilai siswa, tapi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber penilaian, dan penilaian terhadap siswa dilakukan secara holistik.

Penilaian pembelajaran seharusnya tidak hanya digunakan untuk menilai ketercapaian siswa terhadap kompetensi di jenjang tertentu, tetapi juga digunakan sebagai cermin bagi guru dalam menilai proses pembelajaran yang telah diselenggarakannya. Meskipun guru mengatakan telah melakukan hal ini, tapi belum dapat ditemui dokumen atau data lain yang mendukung pernyataan ini.

4. Pengawasan Pembelajaran

Pengawasan pembelajaran berupa pemantauan, supervisi dan evaluasi telah dilakukan di SMP Negeri 19 Jakarta, dan kemudian diakhiri dengan pelaporan, dan tindak lanjut.

Pengawasan pembelajaran dalam standar proses adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan pengawas. Keterbatasan pemahaman kepala sekolah terhadap mata pelajaran yang tidak diampunya juga kemudian menjadi kendala tersendiri ketika akan melakukan pengawasan terhadap pembelajaran. Sehingga dilakukan optimalisasi fungsi wadah guru mata pelajaran di sekolah, untuk mengadakan pengawasan yang dilakukan oleh koordinator tiap mata pelajaran sebagai perpanjangan tangan kepala sekolah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah berdasarkan data yang diperoleh adalah sekali dalam tiap semester. Dalam dokumen program kurikulumnya, SMP Negeri 19 Jakarta memang menetapkan target pengawasan terlaksana minimal satu kali dalam tiap semester. Meskipun secara administratif pengawasan tersebut sudah memenuhi program yang dirancang, tetapi perlu ditelaah lebih jauh lagi tentang efektivitasnya dalam peningkatan mutu pembelajaran.

Selain kepala sekolah dan pengawas sekolah, SMP Negeri 19 Jakarta juga mendapat pengawasan langsung dari Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan status RSBI yang disandangnya.

Pelaporan hasil pengawasan merupakan bagian yang amat penting dari kegiatan pengawasan. Dari laporan yang disusun itulah, kemudian dapat disusun program tindak lanjut untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran.

5. Pemahaman terhadap Standar Proses

Kepala sekolah dan guru sudah memiliki pemahaman yang baik tentang standar proses sebagai salah satu standar dalam standar nasional pendidikan yang memiliki fungsi penting dalam proses pembelajaran. Guru memahami manfaat standar proses sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk mengimplementasikan program dalam kegiatan nyata di lapangan. Kepala sekolah juga telah memahami standar proses sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pembelajaran di sekolah. Pemahaman ini penting karena kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan pembelajaran berpijak pada standar proses atau tidak.

Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi standar proses di SMP Negeri 19 Jakarta, tetapi adanya upaya mengimplementasikan standar proses sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi satu bukti bahwa pemahaman terhadap standar proses memang sudah dimiliki.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Proses

Faktor yang masih menjadi kendala dalam implementasi standar proses di SMP Negeri 19 Jakarta adalah kompetensi guru. Status SMP Negeri 19 Jakarta sebagai RSBI juga berdampak terhadap tingginya tuntutan terhadap kinerja guru. Solusi yang diambil dalam upaya meningkatkan kompetensi guru adalah dengan melakukan kegiatan pengembangan profesi guru di internal sekolah dan optimalisasi peran pengawasan pembelajaran melalui koordinasi berjenjang yang tersistem dan sistematis.

Sedangkan faktor yang paling mendukung adalah kebijakan, baik kebijakan internal sekolah maupun eksternal, dan komitmen kepala sekolah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Begitu banyak kebijakan-kebijakan dari pihak eksternal, seperti pemerintah, pemerintah daerah dan komite sekolah yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran di SMP Negeri 19 Jakarta, khususnya yang terkait dengan status RSBI. Dukungan pengakuan, bentuk-bentuk pelatihan dan dana terus dialirkan untuk mempercepat eskalasi mutu pembelajaran di SMP Negeri 19 Jakarta.

Komitmen kepala sekolah dalam meramu kebijakan-kebijakan eksternal tersebut menjadi kebijakan internal yang tepat juga menjadi faktor yang tak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Karena dukungan dan bantuan yang mengalir akan menjadi tumpul jika tidak ditindaklanjuti dengan tepat.

B. Rekomendasi

1. Pemanfaatan penilaian untuk perbaikan proses pembelajaran hendaknya tidak hanya dilakukan, tapi juga didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi dapat dilakukan oleh guru yang bersangkutan, dalam bentuk catatan sederhana. Hasil penilaian pembelajaran siswa adalah salah satu “cermin” yang baik bagi guru untuk menilai diri sendiri dengan jujur, kemudian memperbaiki yang salah dan meningkatkan yang sudah baik. Jika hal ini dilakukan, maka guru akan semakin mantap melakukan penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakannya. Selain itu, dokumentasi ini juga akan bermanfaat ketika ada rekan sejawat yang mengalami kendala yang sama, sehingga hasil pendokumentasian akan menjadi sumber belajar bagi guru lain. Sekolah perlu memotivasi dan memfasilitasi guru untuk terus melakukan hal ini. Membiasakan menulis di kalangan guru dan berbagi pengalaman dengan sesama, walaupun dari masalah-masalah pembelajaran yang paling sederhana, akan menjadi pupuk yang baik dalam menumbuhkembangkan budaya meneliti di kalangan guru sebagai salah satu bentuk penjaminan mutu pendidikan.
2. Perlu dilakukan optimalisasi peran pengawas sekolah dalam pengawasan pembelajaran. Selain berbentuk pengawasan pembelajaran, idealnya pengawas juga melaksanakan pendampingan pembelajaran. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan pembelajaran oleh pengawas perlu dipertimbangkan, mengingat peran strategis pengawas sebagai

perpanjangan tangan pemerintah daerah yang sangat berkepentingan terhadap meningkatnya mutu pembelajaran di sekolah.

3. Adanya penunjang guru yang selalu sama untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dapat disiasati oleh sekolah dengan menetapkan kewajiban diseminasi dan *sharing file* hasil pelatihan. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban guru yang mengikuti pelatihan, juga dapat memperluas manfaat yang diperoleh sekolah.
4. Akuntabilitas dan transparansi adalah jantung dari kegiatan penjaminan mutu, demikian pula dengan penjaminan mutu pembelajaran di sekolah. Penyusunan laporan pengawasan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah juga merupakan salah satu sarana untuk mencapai akuntabilitas. Keberadaan infrastruktur ICT yang lengkap di sekolah, dapat dimaksimalkan fungsinya dengan cara menampilkan laporan-laporan hasil pengawasan pembelajaran di *website* sekolah, tentunya dengan format laporan yang disesuaikan. Hal ini adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada masyarakat luas, karena bagaimanapun telah menggunakan anggaran dari APBN dan APBD dalam jumlah yang besar. Secara tidak langsung, hal tersebut memiliki makna bahwa masyarakat (bukan hanya komite sekolah) telah mendanai sekolah sedemikian rupa untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu di lingkungan masyarakat.